



ABRI dan Demokratisasi

Militer dan demokrasi, kata orang, ibarat minyak dan air. Keduanya sukar dipertemukan. Militer memutuskan sesuatu berdasarkan garis komando dari atas ke bawah. Sementara dalam demokrasi, nilai utamanya musyawarah. Simpang siur pendapat dianggap wajar, bahwa seharusnya. Cara pandang dua kelompok ini pun berbeda. Dalam masalah kenegaraan, bagi militer keamanan dan ketentraman adalah barang keramat. Apakah dalam menjaga keamanan dan ketentraman dilakukan dengan represif atau tidak, hanyalah soal cara. Sedangkan demokrasi senantiasa mengutamakan kebebasan individu secara luas. Tidak soal, apakah kebebasan itu justru destruktif terhadap keamanan negara.

Benang merah itulah yang seringkali menjebak orang untuk main pukul rata.

Militer di mana pun dianggap sama. Dan demokrasi di mana pun juga dianggap serupa.

Pengkajian terhadap militer di Indonesia pun seringkali berangkat dari premis seperti itu. ABRI kerap dihadapkan secara frontal dengan usaha demokratisasi. Bahkan tindakan pengamanan yang dilakukan ABRI untuk menegakkan keamanan masyarakat, dipandang sebagai aksi militerisme yang anti-demokrasi.

Sejarah yang berbeda

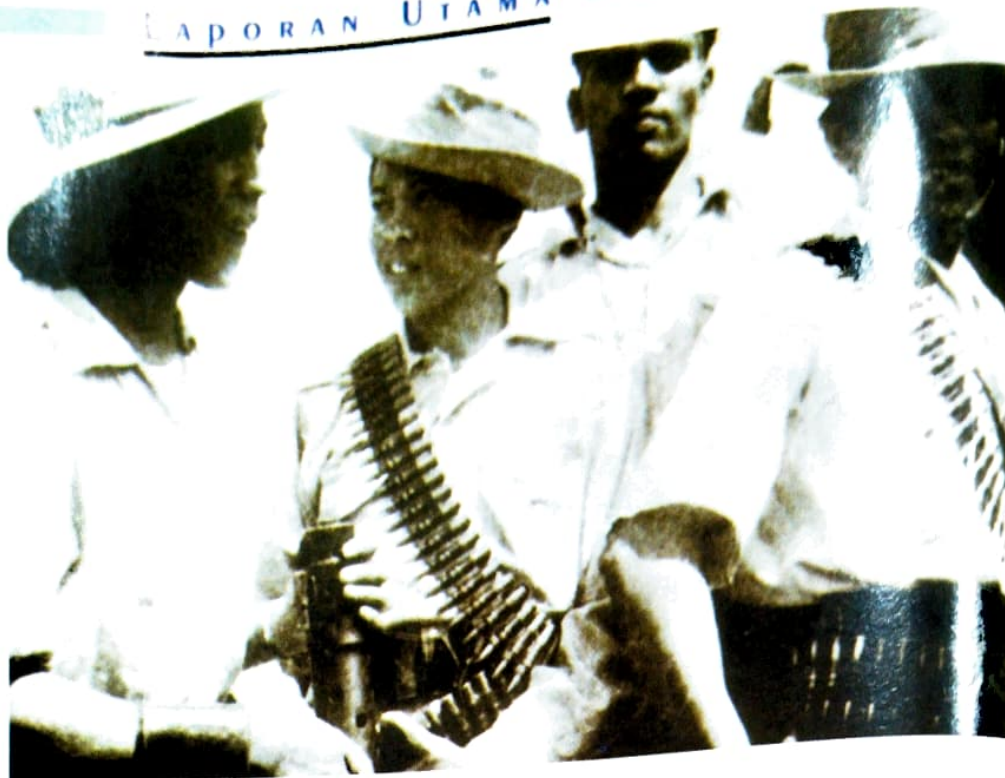
Pandangan bahwa ABRI tidak sejalan dengan demokrasi jelas keliru. Penilaian itu lahir karena menyamaratakan militer di seluruh dunia, padahal peranan militer di setiap negara tidaklah sama. Di sejumlah negara, pemerintahan dilakukan dengan prinsip-prinsip militer yang kaku. Ada

pula negara tertentu yang militernya hanya berfungsi seperti pemadam kebakaran. Hanya bila diperlukan saja militer berfungsi. Dan tidak sedikit pula negara yang menempatkan militernya di posisi tengah.

ABRI mempunyai sejarah yang khusus di tengah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejarah ini yang kemudian membedakan kiprah ABRI di tengah Indonesia merdeka. Biasanya, negara-negara lain membentuk satuan militernya setelah merdeka untuk pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan bagi ABRI, slogan "ABRI berasal dari rakyat" bukanlah sekadar slogan kosong, melainkan realitas sejarah.

Perjuangan kemerdekaan Indonesia semula adalah gerakan sporadis ribuan kelompok-kelompok rakyat yang bergerak tanpa koordinasi, namun punya

dan membentuk 16 divisi, 10 di Jawa dan 6 divisi di Sumatera. Tapi, galibnya negara baru merdeka, pelan-pelan mulai muncul konflik. Terutama antara bekas perwira KNIL dengan PETA. Pada 1 Januari 1946, pemerintah mengubah TKR menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tak lama kemudian, 26 Januari, namanya diganti lagi menjadi Tentara Republik Indonesia. Saat itulah pemerintah mulai tegas dengan menyatakan bahwa TRI adalah satu-satunya organisasi militer di Indonesia. Belum tegas sekali memang. Sebab pemerintah belum menjelaskan kedudukan laskar-laskar rakyat.



Senjata yang direbut dari musuh

Apapun, pembenahan organisasi ketentaraan terus dilakukan. Untuk menyatukan pimpinan militer, 26 Juni 1946 pemerintah mengangkat Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RI, baik darat, laut dan udara. Sebelumnya, 17 Juni, pemerintah melalui UU Keadaan Bahaya membentuk Dewan Militer yang diketuai Presiden Soekarno. Dewan inilah

yang pada tanggal 20 Agustus 1946 membagi Angkatan Perang RI menjadi tiga matra yang dikenal sekarang, yakni darat, laut dan udara.

Dalam pembenahan yang berkelanjutan tersebut, kehadiran laskar-laskar rakyat yang masih dibenarkan itu ternyata menimbulkan persoalan rumit pula.

Sebab, seringkali kebijakan laskar itu tidak sejalan dengan APRI. Bisa dimaklumi, laskar-laskar yang masih tersisa itu pada umumnya adalah laskar terkait pada organisasi-organisasi perjuangan politik sipil. Sehingga, mereka cenderung lebih mematuhi organisasi induknya, ketimbang APRI sebagai satu-satunya organisasi militer resmi.

Seperti diketahui, setelah pemerintah mendorong para pemimpin politik untuk mendirikan partai, partai-partai politik bermunculan bak jamur di musim hujan. Rakyat lalu mengkotak-kotakan dirinya ke dalam partai-partai yang ada. Langkah yang sama juga dilakukan laskar-laskar. Sehingga setelah merdeka hampir setiap partai mempunyai laskar. Yang terkenal antara lain Laskar Hisbullah dari Masjumi, Pemuda Sosialis Indonesia dari PSI, Laskar Rakyat dari PKI, dan Barisan Banteng dari PNI.

Tetapi, walaupun mereka berjasa, kehadirannya menghalangi pembenahan organisasi tentara nasional. Sehingga, pada 5 Mei 1947, Presiden mendirikan Panitia Pembentukan Organisasi

ABRI-Rakyat di zaman pembangunan



TNI. Panitia yang terdiri dari 21 orang ini diketuai Presiden, dan beranggotakan para pemimpin militer serta pemimpin laskar yang tergolong besar. Tanggal 7 Juni 1947, atas rekomendasi Panitia ini, Presiden menetapkan satu-satunya organisasi tentara adalah TNI. Ditetapkan juga, terhitung 3 Juni 1947, seluruh laskar bersenjata secara otomatis dilebur ke dalam TNI.

TNI yang bercikal bakal dari kelompok-kelompok perjuangan rakyat ini tak pelak lagi telah memainkan peranan sangat penting dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Meskipun begitu, TNI tidak berada di posisi sentral konstalasi politik yang memang didominasi sipil. Lazimnya dunia politik, persaingan antara sesama kekuatan politik sipil itu jelas tak terelakkan. Hal itu mengimbas pula ke TNI. Sebab, karena peran pentingnya itu, TNI menjadi ajang perebutan untuk ditarik ke orbit politik sipil. Yang paling gencar ingin menguasai TNI adalah PKI. Tokoh komunis Amir Syarifuddin, misalnya, mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR), 26 Februari 1948 di Solo. Tujuannya menggulingkan pemerintah. Untuk memperkuat

dirinya, FDR mencoba mempengaruhi TNI agar bergabung. Usaha Amir cukup berhasil. George Mc. Turnan Kahin, ahli sejarah politik Indonesia terkemuka, bahkan memperkirakan sekitar 35 persen TNI berhasil dipengaruhi Amir.

Namun, Pemerintah tak kalah siasat. Perdana Menteri Hatta meluncurkan program Reorganisasi dan Rasionalisasi Angkatan Perang. Jumlah prajurit yang tadi sekitar 350.000 orang dipangkas menjadi 160.000 saja, dan 57.000 di antaranya adalah pasukan inti yang terlatih baik dan selalu bergerak. Program ini didukung oleh para pemimpin TNI yang anti-komunis, seperti A.H. Nasution.

Kebijakan Hatta jelas ditentang habis oleh Amir, yang merasa sudah me-

nanamkan kukunya di tentara, terutama di jajaran Angkatan Laut. Akibatnya, sering terjadi bentrokan serius antara TNI yang mendukung rasionalisasi dan TNI yang menentang. Puncak pertikaian itu adalah ketika FDR yang notabene PKI itu menyatakan perebutan kekuasaan melalui pemberontakan di Madiun, 18 September 1948.

Gerakan ini benar-benar menohok dari belakang. Sebab, ketika itu, pemerintah sedang was-was melihat kelakuan Belanda yang tidak mau mematuhi hasil Perjanjian Renville. Benar saja, 19 Desember 1948, Belanda melan-

guise bagi TNI. Sebab, keadaan itu memaksa mereka menjadi solid dan terorganisir. Pemerintah yang sudah menduga serangan Belanda sudah melakukan persiapan politik, yakni dengan menunjuk Menteri Kemakmuran Rakyat Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera. Namun, persiapan militer terabaikan. Keadaan itu membuat Jenderal Soedirman meninggalkan Yogya untuk bergerilya bersama anak buahnya. Ia membentuk dua Kodam, yang langsung di bawah koordinasinya. Satu, Komando Daerah Per-

tahanan Djawa (MBKD) di bawah Kolonel A.H. Nasution, dan satu lagi Komando Daerah Pertahanan Sumatera di bawah Kolonel R. Hidayat, seorang bekas perwira KNIL yang pernah dididik di Akademi Militer Belanda, Breda.

K e n d a t i kedua "kodam" ini sulit berhubungan karena tempat yang saling berjauhan dan terbatasnya alat komunikasi, namun kehadirannya telah meningkatkan moral prajurit TNI. Dalam prakteknya, MBKD yang memang lebih aktif. Sebab ia berhadapan langsung dengan kekuatan utama Belanda di Jawa. Sementara MBKS tidak begitu aktif, karena PDRI lebih "bertugas" untuk promosi internasional. Kolonel Hidayat sendiri diangkat pula sebagai Menteri Pertahanan PDRI.

MBKD dalam gerilyanya berhasil membuat pasukan Belanda frustrasi. Mereka sering menyerang tanpa terduga, dan tiba-tiba menghilang di kegelapan malam. Puncaknya adalah ketika Serangan Umum 1 Maret yang dipimpin Letkol Soeharto. Lewat serangan itulah dunia tahu bahwa Indonesia belum tutup buku. Diperkuat lagi dengan misi internasional wakil-wakil PDRI di luar negeri, seperti LN Palaar di New York dan Dr.

Perjuangan TNI yang terus berlanjut. Mereka sering menyerang tanpa terduga, dan tiba-tiba menghilang di kegelapan malam. Puncaknya adalah ketika Serangan Umum 1 Maret yang dipimpin Letkol Soeharto. Lewat serangan itulah dunia tahu bahwa Indonesia belum tutup buku. Diperkuat lagi dengan misi internasional wakil-wakil PDRI di luar negeri, seperti LN Palaar di New York dan Dr.



Ikut mendamaikan dunia

carkan Agresi Militer II yang dalam waktu singkat berhasil menguasai Yogyakarta. Seluruh pemimpin republik ditawan.

Namun dua peristiwa besar yang terjadi hampir berbarengan ini berhasil diatasi oleh TNI bersama rakyat. Untuk menghadapi PKI di Madiun, TNI hanya butuh waktu 12 hari untuk menguasai keadaan sepenuhnya. Pemimpin PKI Muso ditembak mati, dan Amir ditangkap hidup-hidup. Sayang, tokoh muda seperti Aidit dan kawan-kawan seangkatannya dapat meloloskan diri ke luar negeri. Mereka inilah yang mengulangi lagi ulah seniornya dalam G30S/PKI, 17 tahun kemudian.

Sementara serangan Belanda ke Yogya itu justru menjadi *blessing in dis-*



Missi damai di Kamboja

Sudarsono di New Delhi. Kemenangan politik itu membuat PBB segera mendesak Belanda untuk berunding lagi dengan Indonesia. Lahirlah perundingan yang kemudian menghasilkan Perseutujuan Roem-Royen yang terkenal itu, 7 Mei 1949, yang berikutnya membawa kedua negara ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Setelah penjajah benar-benar angkat kaki, tugas TNI tak langsung berkurang. Sembilan tahun kemudian, pecah aksi PRRI/Permesta. Aksi ini berhasil diatasi TNI hanya dalam tempo enam bulan.

Peran penyelamatan negara yang juga monumental adalah pemberantasan G30S/PKI, 1965. Gerakan pembersihan PKI yang dilakukan TNI bersama seluruh rakyat, ternyata telah mengantarkan ke pemerintahan yang baru, Orde Baru.

Keberpihakan pada rakyat

Lintasan sejarah singkat TNI/ABRI itu kiranya membuktikan bahwa ABRI benar-benar berasal dari rakyat, dan selalu berada di garis depan apabila kepentingan rakyat terhadap negara dan kemerdekaan terganggu. Dengan demikian, slogan ABRI "Pejuang dan Prajurit" mempunyai akar historis yang jelas. Presiden Soeharto dalam berbagai kesempatan menjelaskan makna filosofis

slogan itu. "ABRI itu pertama-tama adalah pejuang, baru setelah prajurit," kata Presiden. Kenyataannya memang demikian, pada mulanya anggota ABRI itu adalah para pejuang yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Setelah negara membentuk organisasi militer, para pejuang tadi resmi menjadi prajurit ABRI.

Karena latar belakang historis itu, aplikasi nilai-nilai kemiliteran ABRI berbeda dengan negara lain. Dalam sasanti ABRI seperti Sumpah Prajurit atau Delapan Wajib ABRI, terlihat jelas keberpihakan kepada rakyat. ABRI, karena akar sejarah tadi, menjadi pengayom kepentingan rakyat. Istilah seperti "terbaik bagi rakyat, terbaik bagi ABRI" tentu tidak dicetuskan sembarangan.

Dalam mengejawantahkan kepentingan rakyat itulah ABRI memiliki dua fungsi: Pertahanan keamanan dan sosial politik. Fungsi pertahanan keamanan mewajibkan setiap prajurit ABRI menjaga setiap jengkal tanah Indonesia dari segala macam gangguan. Sementara melalui fungsi sosial politiknya, ABRI berkewajiban mendorong proses kehidupan berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan prinsip demokrasi seperti diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

Jadi, mengembangkan demokrasi adalah tugas yang dipikul ABRI. Pertanyaannya sekarang bukan lagi dapatkah ABRI menerima arus demokratisasi, melainkan sudah seberapa jauh ABRI melakukan tugasnya itu.

Kalau dilihat dalam wacana permusyawaratan rakyat, DPR/MPR, peranan mendorong demokrasi itu tidaklah mengecewakan. Iklim keterbukaan politik yang sempat menjadi topik perbincangan beberapa tahun lalu justru dipompakan oleh F-ABRI di DPR. Anggota F-ABRI ketika itu seperti Mayjen Syamsuddin atau Almarhumah Brigjen (Pol) Rukmini adalah dua pendekar keterbukaan yang nyaring.

Satu langkah maju lagi dalam pembangunan demokrasi Pancasila adalah perumusan konsepsional tentang makna Demokrasi Pancasila

yang sedang dilakukan Wanhankamnas. "Demokrasi Pancasila itu kan masih mencari bentuk. ABRI berinisiatif untuk merumuskannya, tentu saja dengan mencari masukan dari berbagai pihak," ujar anggota F-ABRI DPR, Soenarto.

Dalam pembangunan demokrasi itu peranan F-ABRI sebagai perpanjangan tangan ABRI di lapangan sospol tentu sangat besar. Jika demokratisasi itu diasumsikan sebagai desakan globalisasi, maka F-ABRI kelihatannya yang paling siap. Salah satu kebiasaan ABRI, seperti dikatakan Mulyana W. Kusuma, dalam menjalankan fungsi sopolnya adalah terus merumuskan berbagai konsep. Misalnya, seperti yang dilakukan Wanhankamnas selama ini. Dan untuk mengulirkan ide itu di lembaga legislatif, anggota F-ABRI mempunyai kemampuan yang beragam dan teruji. Maklum, sebagaimana dijelaskan Ketua F-ABRI Suparman Ahmad, anggota F-ABRI paling rendah berpangkat perwira menengah. "Pendidikan minimal harus lulus Sesko," kata Suparman. Bahkan tidak sedikit pula mantan panglima Kodam yang ditugaskan menjadi wakil rakyat.

Kualifikasi yang rata-rata tinggi itu kiranya menjamin bahwa demokratisasi di Indonesia akan berkembang terus. □ (TJA)

Letjen TNI Suparman Ahmad
Ketua FABRI, DPR-RI

Di F-ABRI tidak bisa lagi gaya komandan

Apa kriteria seorang anggota ABRI untuk bisa duduk di Fraksi ABRI DPR-RI ?

Fraksi ABRI di DPR RI sebagai wakil rakyat karena diangkat. Untuk pengangkatan itu ada kriteria-kriteria khusus. Pertama, paling tidak perwira menengah. Kedua, mempunyai pengalaman lapangan, pendidikan, teritorial, intel maupun sosial politik. Ketiga, *background* pendidikannya minimal Seskoad, Seskoal, Seskoau atau Sespimpol.

Selain itu juga dipertimbangkan sikap mentalnya, stabilitas pribadi, dan *performance*-nya. Walau dia pintar, tapi tidak bisa ngomong, tak bisa di DPR. Itu pun masih perlu ditambah dengan penataran yang dilakukan oleh ABRI yang dikenal dengan Kursus Kekaryaannya sekitar 3 bulan. Setelah lulus, baru anggota tersebut menyesuaikan dengan lingkungan fraksi. Di samping tentu saja sikap dasar seorang prajurit, yaitu disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Sebagai anggota DPR, hirarki pangkat masih mempengaruhi? Tidak lagi. Di FABRI tidak lagi dilihat kepangkatannya, melainkan prestasi kerjanya. Apa jabatan yang dipegangnya di Fraksi, itu yang jadi ukuran. Misalnya, seorang komandan, terus menjadi anggota FABRI. Kemudian masih ingin seperti komandan, ya nggak bisa, dia harus merasa sebagai perorangan, pembawa misi demokrasi Pancasila.

Siapa yang mengusulkan seorang anggota ABRI untuk menduduki kursi anggota DPR ?

Mereka yang akan duduk di DPR itu diusulkan oleh masing-masing angkatan

kepada Pangab. Prosesnya, personilnya menyampaikan kepada kepala staf angkatan, dan diteruskan ke Pangab, dalam hal ini sospol untuk menentukan siapa-siapa yang pantas duduk di DPR.

Dalam menyampaikan berbagai kebijakan, dengan siapakah FABRI berkonsultasi?

F-ABRI sudah diberi program oleh Mabes ABRI, di samping kita meneliti berbagai perkembangan yang muncul. Dan berkonsultasi dengan Mabes ABRI, biasanya dilakukan saat-saat akan reses. Di sana kita mendapat arahan-arahan, tapi



Letjen TNI Suparman Ahmad

arahan itu bukan untuk kepentingan ABRI. Tapi untuk kepentingan masyarakat yang dihasilkan oleh FABRI.

Mengapa anggota FABRI dikurangi menjadi 75 orang?

Secara singkat dapat saya katakan, dulunya memang 75 dan ditambah 25 dengan unsur-unsur dari 3-non, yaitu

non-partisan, non-afiliasi. Semuanya dimasukkan ke FABRI. Sekarang, kita melihat, situasi sudah memungkinkan dengan kekuatan 75 saja sudah cukup, tidak perlu seratus. Sehingga banyak yang dipilih dari yang diangkat.

Pengurangan itu tidak akan mempengaruhi kinerja FABRI nantinya ?

Saya kira tidak. Sebab, bagi ABRI di mana pun bertugas, dia harus membawa misi stabilisator dan dinamisator. Tidak peduli apakah dia beberapa orang atau sendirian. Sehingga, menurut FABRI, siapa pun yang ditugaskan harus mampu. Dan dengan 75 itu masih mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Menurut sejumlah pengamat, beberapa anggota F-ABRI terlihat cukup vokal. Mereka tidak ditegur?

Tidak. Vokal itu tidak dilarang sejauh masih dalam *frame* yang kitaanut bersama sesuai dengan arahan Pangab.

F-ABRI membenarkan anggoutanya untuk vokal. Cuma kita perlu meluruskan jangan sampai keluar dari *frame* yang ada, yaitu UUD 1945, Pancasila, 11 Azas Kepemimpinan, 8 Wajib ABRI dan instruksi yang diberikan Pangab. UU kita membolehkan berbeda pendapat, cuma kita cari titik temu persamaannya.

Bagaimana kira-kira penampilan F-ABRI ke depan, paling tidak untuk lima tahun mendatang ?

Saya melihat, sejauh FABRI tidak menang-menangan, itu diterima fraksi-fraksi lain. Jadi, sekarang kita tidak mengembangkan FABRI di atas semua golongan. Itu tidak benar. Yang benar adalah FABRI berada di antara golongan-golongan yang ada dalam jarak yang sama. Kita saling asah, saling asih sebagai anggota dewan. Jadi sikap-sikap yang bertentangan dengan politik tidak pas di sini.

Bagaimana program-program F-ABRI selama ini diterima oleh DPR ? Selama lima tahun belakangan, program-

program FABRI berjalan sesuai rencana. Di samping kita siap dikoreksi, kita juga siap mengoreksi. Kalau kita bicara program, itu sama dengan kita waktu di kesatuan. Ada program, bagaimana meningkatkan program. Sekarang kita mengharapkan FABRI, kualitas perorangannya terus meningkat. Itu bukan hanya upaya pimpinan fraksi, tapi setiap orang harus merasa apa yang kurang pada dirinya harus ditambah.

Banyak anggota fraksi yang memperoleh gelar kesarjana karena kuliah di sela waktu luang. Dari 100 orang ini hampir semua sudah memperoleh gelar S1. Sehingga tidak perlu diragukan lagi kalau berbicara sisi akademik maupun aplikasi ilmu mereka.

Apa saja tantangan yang dihadapi FABRI selama ini ?

Hambatan-hambatan itu selalu ada, tapi kita mencoba mengeliminir. Sejauh ini, persiapan untuk jadi anggota dewan sudah lengkap. Di sini, taraf kehidupannya jauh lebih bagus. Artinya, manfaat yang harus dicapai juga harus lebih tinggi. Kita di sini tidak pernah mengeluh melaksanakan tugas apa saja, bahkan di luar jam-jam yang telah ditentukan tata tertib, kita gunakan untuk mengisi kekurangan itu.

Bagaimana cara F-ABRI untuk menerima aspirasi masyarakat ?

Kita di sini sifatnya menunggu. Menunggu mereka menyampaikan laporan-laporan atau unjuk rasa. Tetapi setiap selesai masa persidangan kita juga datang ke daerah-daerah mengecek, menerima keluhan, menerima apa saja untuk kita bicarakan di sini. Menurut saya ABRI mungkin lebih cepat menyelesaikannya. Contohnya, ada masalah tanah dengan daerah. Bagi kita kan gampang, tinggal telpon Korem, tanyakan ada persoalan begini bagaimana. Kita langsung ngomong. Ini karena jaringan ABRI dari atas sampai bawah lancar, dan itu kita gunakan tiap waktu. Jadi orang lebih banyak menyampaikan aspirasinya ke ABRI karena lebih memuaskannya dari segi penyelesaian masalah. □ (dle)

Mulyana W. Kusumah
Pengamat Politik

Dwi-fungsi ABRI makin relevan

Bagaimana Anda melihat peran ABRI dalam proses demokratisasi di Indonesia ?

Menurut saya, peran kelembagaan ABRI, makin lama makin kuat. Kita lihat saja nanti bagaimana komposisi dalam kepemimpinan di DPRD di daerah-daerah, yang mungkin itu sangat menentukan. Tidak hanya jumlah persentase dari Golkar, Tapi pengaruh politik dari ABRI menjadi semakin kuat.

Di masa datang, saya kira tema reaktualisasi dwifungsi ABRI menjadi semakin relevan. Sehingga, akan memberikan tempat dan peranan yang lebih memadai bagi kekuatan-kekuatan politik sipil. Yang jelas, dalam menjalankan perannya sebagai kekuatan politik, ABRI



Mulyana W. Kusumah

terus menggodok berbagai konsep. Cuma caranya yang berbeda. Dulu konsep itu di-floor-kan melalui seminar, seperti Seminar Angkatan Darat dan sebagainya. Sekarang digodok dalam circle yang terbatas.

Apakah visi perjuangan ABRI dewasa ini seirama dengan demokratisasi ?

Banyak konsep dan gagasan ABRI yang perlu difasilitasi lebih konkret. Misalnya gagasan Pak Syarwan (Letjen. TNI Syarwan Hamid-Red) tempo hari tentang perlu adanya dialog politik nasional dengan kekuatan-kekuatan pro-demokrasi. Itu kan gagasan konstruktif yang perlu difasilitasi forumnya. Dengan adanya dialog itu, akan terjalin komunikasi dengan kekuatan politik sipil.

Lalu cara penyelesaian ABRI terhadap aksi protes masyarakat ?

ABRI harus meningkatkan *Public Accountability*-nya. Misalnya, jika terpaksa melakukan tindakan represi harus ada pertanggungjawaban publik yang lengkap dan transparan. Ini dengan sendirinya justru akan meningkatkan kredibilitas ABRI di mata masyarakat.

Saran Anda buat ABRI dalam proses demokratisasi di Indonesia selanjutnya ?

Langkah awalnya adalah mengupayakan agar ABRI bisa menurunkan orang-orang terbaiknya untuk melakukan dialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Karena, sebagian masalah politik yang berkembang adalah karena persoalan mis-komunikasi politik. Saya kira di situ kita bisa saling membuka posisi kita masing-masing. Dan perbedaan pandangan harus ditolerir.

Mengapa mis-komunikasi itu bisa terjadi ?

Karena forum yang memungkinkan adanya komunikasi itu tidak ada. Seharusnya, seminar-seminar politik dan sebagainya yang diselenggarakan ABRI, harus menampilkan pembicara-pembicara dengan warna lain. Demikian pula dialog atau seminar yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi harus pula menampilkan pembicara-pembicara dengan pikiran lain. Itu yang saya maksud adanya komunikasi politik. Dialog politik itu suatu keharusan. Siapa pun dia, entah ABRI atau kalangan politik yang lain memang harus membuka komunikasi seluas mungkin. □ (die)